

Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Korupsi

Della Juwita¹, Yoserizal²

¹Universitas Andalas, dellajuwita909@gmail.com

²Universitas Andalas, yoserizal@soc.unand.ac.id

Info Artikel

Article history:

Received Nov, 2024

Revised Jan, 2025

Accepted Jan, 2025

Kata Kunci:

Faktor Penyebab, Hukum,
Integritas, Korupsi,
Pengawasan, Reformasi

Keywords:

Causes, Corruption, Integrity, Law,
Oversight, Reform

ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang menghambat pembangunan di banyak negara, salah satunya yaitu Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di sektor publik dan swasta. Melalui tinjauan literatur, beberapa faktor penyebab korupsi yang sering muncul meliputi lemahnya sistem pengawasan, rendahnya tingkat transparansi dalam pemerintahan, rendahnya integritas individu, rendahnya tingkat kesejahteraan pegawai, serta lemahnya penegakan hukum yang berlaku. Selain itu faktor budaya dan norma sosial yang permisif terhadap perilaku korupsi dan faktor ekonomi yang tidak merata juga berperan penting dalam memperkuat praktik korupsi. Hal ini menyebabkan pentingnya reformasi kelembagaan, peningkatan transparansi, serta pemberdayaan masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah sebagai langkah preventif untuk menekan angka korupsi. Dengan memahami faktor-faktor penyebab korupsi, diharapkan dapat dirumuskannya kebijakan yang lebih efektif dalam memberantas korupsi secara sistematis dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Corruption is one of the most serious issues hindering development in many countries, including Indonesia. This article aims to analyze various factors contributing to corruption in both the public and private sectors. Through a literature review, several common causes of corruption have been identified, including weak oversight systems, low transparency in governance, lack of individual integrity, low employee welfare, and weak law enforcement. Additionally, cultural and social norms that tolerate corrupt behavior, as well as economic disparities, also play a significant role in reinforcing corrupt practices. These factors highlight the importance of institutional reform, increased transparency, and community empowerment in monitoring government performance as preventive measures to reduce corruption rates. By understanding the root causes of corruption, more effective policies can be formulated to systematically and sustainably combat corruption.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Della Juwita

Institution: Universitas Andalas

Email: dellajuwita909@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia, dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Masalah ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan mengurangi kualitas pelayanan publik. Fenomena korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, baik publik maupun swasta, yang menunjukkan bahwa tidak ada sektor yang sepenuhnya bebas dari risiko korupsi. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mendorong terjadinya korupsi agar langkah-langkah pencegahan yang efektif dapat dirumuskan dan diimplementasikan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai penyebab korupsi yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk memberantas korupsi secara sistematis dan berkelanjutan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Pengertian Korupsi*

Pusat Edukasi Anti Korupsi (2023) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, baik di sektor publik maupun swasta. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara. Olivia (2021) menyatakan bahwa korupsi dapat berbentuk suap, penggelapan, nepotisme, serta penyalahgunaan kekuasaan.

2.2 *Faktor Penyebab Korupsi*

Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka korupsi di Indonesia adalah lemahnya sistem pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara. Menurut penelitiannya Sukmadani & Ibrahim (2021), kurangnya pengawasan yang ketat dalam manajemen keuangan negara memberikan peluang besar bagi praktik korupsi untuk berkembang. Tanpa pengawasan yang baik, banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi untuk menyalahgunakan dana publik. Lemahnya pengawasan ini sering kali terjadi karena kurangnya sumber daya manusia yang kompeten serta sistem audit yang tidak berjalan dengan efektif.

Selain itu, rendahnya tingkat transparansi dalam pemerintahan juga menjadi faktor signifikan yang mendorong terjadinya korupsi. Irawan & Haryanto, (2020) menyoroti bahwa sistem pemerintahan yang tidak transparan memberikan ruang bagi pejabat publik untuk menyalahgunakan wewenang mereka. Dalam banyak kasus, akses masyarakat terhadap informasi mengenai anggaran dan kebijakan pemerintah sangat terbatas, sehingga memungkinkan praktik korupsi berkembang tanpa adanya pengawasan dari masyarakat sipil. Transparansi yang rendah ini diperburuk oleh birokrasi yang berbelit-belit serta minimnya keterbukaan dalam pengadaan barang dan jasa di sektor publik.

Kurangnya integritas individu juga turut menjadi penyebab utama korupsi di Indonesia. Rohman (2020) menjelaskan bahwa rendahnya nilai moral dan etika di kalangan pejabat publik dan pegawai swasta sering kali menjadi pemicu tindakan korupsi. Banyak individu yang tergoda untuk melakukan tindakan tidak jujur karena adanya kesempatan dan minimnya risiko sanksi yang berat. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat kesejahteraan pegawai, yang dalam beberapa kasus membuat mereka mencari cara lain untuk memperoleh keuntungan finansial. Ketika kesejahteraan pegawai rendah dan mereka dihadapkan pada peluang untuk melakukan korupsi tanpa pengawasan ketat, maka tindakan tersebut cenderung meningkat.

Faktor lainnya adalah lemahnya penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Menurut Metro TV (2024), hukuman bagi pelaku korupsi di Indonesia masih tergolong

ringan dibandingkan dengan negara lain yang memiliki kebijakan antikorupsi yang ketat. Banyak kasus korupsi yang berakhir dengan hukuman yang tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan terhadap negara. Hal ini membuat para pelaku tidak merasa jera dan justru semakin berani melakukan tindakan korupsi. Reformasi dalam sistem hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan korupsi dihukum dengan tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku lainnya.

Dari perspektif sosial dan budaya, Wulandari (2022) menyatakan bahwa norma sosial yang permisif terhadap korupsi juga berkontribusi dalam meningkatkan angka korupsi di Indonesia. Dalam beberapa lingkungan, praktik korupsi seperti suap dan gratifikasi masih dianggap sebagai hal yang wajar dan merupakan bagian dari budaya kerja yang sulit dihilangkan. Sikap masyarakat yang cenderung menerima dan bahkan menganggap korupsi sebagai sesuatu yang lumrah menyebabkan sulitnya upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi independen.

2.3 Strategi Pemberantasan Korupsi

Untuk mengatasi masalah korupsi yang semakin kompleks, diperlukan berbagai strategi pemberantasan yang efektif. Salah satu strategi utama adalah penguatan sistem pengawasan melalui audit berkala dan transparansi yang lebih tinggi dalam administrasi pemerintahan. Sukmadani & Ibrahim (2021) menekankan bahwa pengawasan internal yang ketat dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan negara sebelum masalah semakin besar. Selain itu, penerapan sistem *e-Government* yang efektif juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan meminimalisir celah bagi praktik korupsi (Irawan & Haryanto, 2020). Digitalisasi proses administrasi pemerintahan memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran publik secara lebih terbuka.

Selain itu, pendidikan dan pelatihan antikorupsi bagi pejabat publik serta masyarakat sangat penting untuk membangun budaya integritas dalam sektor publik dan swasta. Rohman (2020) menjelaskan bahwa pelatihan tentang etika dan moralitas bagi pejabat pemerintah dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Pendidikan antikorupsi sejak dini juga diperlukan untuk membentuk generasi mendatang yang memiliki kesadaran tinggi akan bahaya korupsi (JDIH, 2001).

Strategi lainnya adalah reformasi dalam sistem hukum dan peningkatan sanksi bagi pelaku korupsi. Metro TV (2024) menyoroti bahwa negara-negara yang memiliki kebijakan hukum yang tegas terhadap korupsi cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Oleh karena itu, reformasi hukum yang lebih ketat diperlukan agar memberikan efek jera yang lebih kuat bagi pelaku korupsi di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka korupsi di Indonesia serta strategi pemberantasan yang dapat diterapkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber terpercaya, seperti jurnal akademik, laporan dari lembaga antikorupsi, undang-undang terkait, serta pemberitaan media nasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Berbagai referensi yang digunakan mencakup penelitian sebelumnya yang membahas penyebab korupsi, regulasi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, serta laporan dari organisasi independen yang berfokus pada transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Dalam analisis data, penelitian ini menerapkan analisis isi (*content analysis*), di mana data yang telah dikumpulkan dikaji secara sistematis untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara faktor penyebab korupsi serta strategi pemberantasan yang telah diterapkan di berbagai negara. Proses analisis dilakukan dalam beberapa tahapan, yakni:

- a. Identifikasi faktor utama yang menyebabkan meningkatnya angka korupsi berdasarkan studi literatur dan data empiris yang tersedia.
- b. Klasifikasi faktor-faktor tersebut ke dalam beberapa kategori utama, seperti kelemahan sistem pengawasan, rendahnya transparansi, kurangnya integritas individu, serta lemahnya penegakan hukum.
- c. Analisis hubungan antara faktor-faktor tersebut, untuk memahami bagaimana mereka saling berinteraksi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung praktik korupsi.
- d. Evaluasi strategi pemberantasan korupsi yang telah diterapkan di berbagai negara dan menilai efektivitasnya dalam konteks Indonesia.
- e. Perumusan rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan penelitian, dengan tujuan menghasilkan solusi yang dapat diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan.

Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang mendorong korupsi serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat korupsi secara signifikan di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Meningkatnya angka korupsi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan, yaitu lemahnya sistem pengawasan, rendahnya transparansi dalam pemerintahan, kurangnya integritas individu, serta lemahnya penegakan hukum. Dalam bagian ini, setiap faktor akan dianalisis secara lebih mendalam untuk memahami akar permasalahan dan bagaimana setiap aspek berkontribusi dalam memperburuk situasi korupsi di Indonesia.

4.1 Lemahnya Sistem Pengawasan

Salah satu penyebab utama maraknya korupsi adalah lemahnya pengawasan baik dari internal lembaga pemerintah maupun dari eksternal, seperti lembaga independen dan masyarakat sipil. Sistem pengawasan yang tidak efektif menyebabkan banyak praktik penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara dan proyek-proyek infrastruktur. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal di berbagai instansi sering kali hanya bersifat administratif dan kurang mendalam dalam menganalisis aliran dana serta efisiensi penggunaannya. Selain itu, banyak audit yang dilakukan bersifat tertutup, sehingga masyarakat tidak dapat turut mengawasi atau memberikan masukan terkait kebijakan yang berjalan.

Dari segi pengawasan eksternal, lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menghadapi tantangan besar dalam memberantas korupsi karena keterbatasan sumber daya manusia serta tekanan politik. Banyak rekomendasi yang diberikan oleh lembaga ini tidak diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah, sehingga kasus-kasus korupsi terus terjadi tanpa tindakan pencegahan yang signifikan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan publik juga masih rendah karena kurangnya akses informasi yang memungkinkan mereka untuk turut serta dalam mengawasi kebijakan pemerintah secara efektif.

4.2 Rendahnya Transparansi dalam Pemerintahan

Transparansi merupakan elemen kunci dalam mencegah korupsi. Namun, banyak instansi pemerintah di Indonesia masih memiliki sistem yang tertutup dalam mengelola informasi terkait anggaran, proyek pembangunan, serta kebijakan publik lainnya. Kurangnya transparansi ini menciptakan ruang bagi praktik kolusi dan nepotisme dalam berbagai sektor. Salah satu contoh konkret dari kurangnya transparansi adalah dalam proses

pengadaan barang dan jasa. Sistem lelang proyek yang tidak terbuka sering kali memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu melalui praktik penunjukan langsung yang tidak sesuai prosedur.

Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan sistem *e-Government* dan *e-Procurement* untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, masih banyak celah yang memungkinkan manipulasi data dan penyalahgunaan anggaran. Banyak daerah yang belum menerapkan sistem ini secara penuh, sehingga praktik manual yang lebih rentan terhadap korupsi masih mendominasi dalam tata kelola administrasi pemerintahan.

4.3 Kurangnya Integritas Individu

Aspek moral dan etika individu juga menjadi faktor utama dalam meningkatnya angka korupsi. Banyak pejabat publik dan pegawai pemerintahan yang memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang mereka karena tidak adanya pengawasan yang ketat. Rendahnya kesadaran akan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas publik menyebabkan banyak individu tergoda untuk melakukan tindakan korupsi demi keuntungan pribadi atau kelompok.

Banyak penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesejahteraan pegawai negeri dapat menjadi salah satu faktor pendorong korupsi. Gaji yang tidak mencukupi kebutuhan hidup sering kali membuat pejabat atau pegawai mencari sumber pendapatan tambahan melalui cara yang tidak sah. Selain itu, budaya birokrasi yang telah lama terjebak dalam praktik gratifikasi dan suap membuat individu yang baru masuk ke dalam sistem juga terdorong untuk mengikuti pola yang sudah ada.

4.4 Lemahnya Penegakan Hukum

Salah satu tantangan terbesar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi. Banyak kasus korupsi yang berakhir dengan hukuman ringan atau bahkan bebas dari hukuman, sehingga tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku lainnya. Sistem peradilan yang masih rentan terhadap intervensi politik serta praktik suap di berbagai tingkatan hukum semakin memperburuk keadaan.

Selain itu, proses hukum terhadap kasus korupsi sering kali berlangsung sangat lama, menyebabkan publik kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Banyak kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi atau tokoh politik yang akhirnya berujung pada vonis yang lebih ringan dibandingkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih belum cukup kuat dalam memberikan sanksi yang sepadan terhadap pelaku korupsi.

4.5 Strategi Pemberantasan Korupsi

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang telah disebutkan, diperlukan strategi pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif dan berbasis data. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah penguatan sistem pengawasan dengan melibatkan lebih banyak lembaga independen serta meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan implementasi sistem *e-Government* untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proyek publik.

Selain itu, peningkatan kesejahteraan pegawai negeri dapat menjadi solusi untuk mengurangi insentif korupsi yang bersumber dari kesulitan ekonomi individu. Pendidikan antikorupsi juga perlu diperkenalkan sejak dini dalam sistem pendidikan nasional untuk membangun kesadaran akan pentingnya integritas dan etika dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.

Reformasi sistem hukum juga menjadi langkah yang tidak dapat dihindari. Pemerintah perlu menerapkan hukuman yang lebih tegas dan memastikan bahwa proses hukum terhadap kasus korupsi berjalan secara transparan dan bebas dari intervensi politik.

Penguatan lembaga peradilan serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga harus menjadi prioritas dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Faktor utama yang menyebabkan meningkatnya angka korupsi di Indonesia adalah kombinasi dari lemahnya sistem pengawasan, rendahnya transparansi pemerintahan, kurangnya integritas individu, serta lemahnya penegakan hukum. Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta. Dengan strategi yang tepat, diharapkan angka korupsi di Indonesia dapat ditekan secara signifikan dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai literatur dan data sekunder yang dikumpulkan, ditemukan bahwa faktor utama yang menyebabkan meningkatnya angka korupsi di Indonesia adalah lemahnya sistem pengawasan, rendahnya tingkat transparansi, serta minimnya integritas individu dalam pemerintahan maupun sektor swasta. Kurangnya pengawasan internal dan eksternal memungkinkan terjadinya praktik korupsi tanpa adanya konsekuensi yang signifikan bagi pelaku. Selain itu, proses birokrasi yang panjang dan kurang transparan menciptakan celah bagi penyalahgunaan wewenang, terutama dalam pengelolaan keuangan negara dan proyek-proyek infrastruktur.

Rendahnya transparansi dalam sistem pemerintahan juga menjadi salah satu penyebab utama korupsi. Dalam banyak kasus, informasi mengenai kebijakan dan anggaran publik tidak tersedia secara terbuka, sehingga masyarakat tidak memiliki akses yang memadai untuk mengawasi kinerja pemerintah. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko korupsi dalam berbagai sektor.

Selain faktor struktural, penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya integritas individu menjadi pemicu utama terjadinya praktik korupsi. Budaya permisif terhadap gratifikasi dan suap yang masih berkembang di berbagai kalangan menyebabkan sulitnya pemberantasan korupsi secara efektif. Banyak pejabat publik yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, terutama karena lemahnya sistem hukum yang tidak memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi.

Dalam analisis strategi pemberantasan korupsi, ditemukan bahwa penerapan sistem *e-Government* dan digitalisasi administrasi dapat meningkatkan transparansi serta mengurangi interaksi langsung antara pejabat dan masyarakat, yang sering kali menjadi titik awal terjadinya praktik korupsi. Penguatan pengawasan melalui audit berkala, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik, serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku korupsi juga menjadi langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa strategi pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan multidimensional. Reformasi birokrasi, peningkatan kesejahteraan pegawai untuk mengurangi insentif korupsi, serta pendidikan antikorupsi sejak dini merupakan langkah yang perlu diimplementasikan untuk menekan angka korupsi dalam jangka panjang.

5. KESIMPULAN

Korupsi merupakan masalah kompleks yang berakar dari berbagai faktor yang saling terkait. Lemahnya sistem pengawasan, rendahnya transparansi, kurangnya integritas individu, serta penegakan hukum yang tidak efektif menjadi penyebab utama terjadinya praktik korupsi di Indonesia. Selain itu, norma sosial yang permisif terhadap perilaku koruptif serta ketidakmerataan ekonomi turut memperburuk situasi ini. Untuk menanggulangi masalah korupsi secara sistemik dan berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup reformasi kelembagaan, peningkatan transparansi, serta pendidikan masyarakat mengenai nilai-nilai integritas.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, penguatan sistem pengawasan di sektor publik dan swasta harus menjadi prioritas. Peningkatan kapasitas lembaga pengawas dan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemantauan dapat menjadi solusi efektif dalam mendeteksi serta mencegah praktik korupsi secara *real-time*. Selain itu, pemerintah harus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proses pengambilan keputusan. Penerapan sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses oleh publik akan membantu mengurangi ruang bagi praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Di sisi lain, pendidikan tentang integritas dan etika harus diperkenalkan sejak dini, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat luas. Kampanye kesadaran publik mengenai bahaya korupsi serta penanaman nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dapat membantu membangun budaya anti-korupsi yang lebih kuat. Selain itu, reformasi dalam sistem hukum harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum serta memberikan pelatihan yang lebih baik bagi aparat penegak hukum agar dapat menangani kasus korupsi secara lebih efektif dan tegas.

Peran serta masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Dengan membentuk forum-forum masyarakat dan menyediakan saluran pelaporan yang aman dan terpercaya, partisipasi publik dalam pencegahan korupsi dapat lebih ditingkatkan. Masyarakat harus diberikan akses yang lebih luas untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan serta pengawasan terhadap proyek-proyek pemerintah agar tercipta lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, untuk mengatasi korupsi secara efektif, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan terkoordinasi, melibatkan pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan menerapkan langkah-langkah strategis yang telah diuraikan, diharapkan angka korupsi dapat ditekan secara signifikan, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Irawan, B., & Haryanto, A. (2020). Korupsi dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 8(3), 213–228.
- JDIH. (2001). *Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. <https://jdih.komisiyudisial.go.id/frontend/detail/4/9>
- Metro TV. (2024). *Tren Korupsi di Indonesia Konsisten Meningkat*. [https://www.metrotvnews.com/play/b1oC9Lqq-tren-korupsi-di-indonesia-konsisten-meningkat#:~:text=Hasil riset terbaru Indonesia Corruption,dan 271 kasus di 2019.&text=Jumlah tersangka pun turut meningkat,Hukuman bagi koruptor harus dimaksimalkan](https://www.metrotvnews.com/play/b1oC9Lqq-tren-korupsi-di-indonesia-konsisten-meningkat#:~:text=Hasil%20riset%20terbaru%20Indonesia%20Corruption,dan%20271%20kasus%20di%202019.&text=Jumlah%20tersangka%20pun%20turut%20meningkat,Hukuman%20bagi%20koruptor%20harus%20dimaksimalkan).
- Olivia. (2021). *Korupsi: Pengertian, Jenis, dan Cara Memberantasnya*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5803362/korupsi-pengertian-jenis-dan-cara-memberantasnya>
- Pusat Edukasi Anti Korupsi. (2023). *Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi*. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>
- Rohman, A. (2020). Reformasi Birokrasi untuk Mencegah Korupsi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 121–135.
- Sukmadani, H., & Ibrahim, F. (2021). Analisis Faktor Penyebab Korupsi di Sektor Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(1), 45–58.
- Wulandari, T. (2022). *16 Faktor Penyebab Korupsi dari Aspek Individu Hingga Organisasi*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5975109/16-faktor-penyebab-korupsi-dari-aspek-individu-hingga-organisasi>